

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan suatu kota tidak terlepas dari aspek pembentuk kota. Aspek pembentuk tersebut meliputi sosial budaya, ekonomi, pemukiman, kependudukan, sarana dan prasarana serta transportasi. Adanya peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan kegiatan sosial-ekonomi, juga peningkatan kebutuhan pelayanan, dan selaras dengan itu akan terjadi peningkatan prasarana. Infrastruktur merupakan kelengkapan dasar lingkungan, kawasan, kota, atau wilayah (ruang/spatial). Pengembangan daerah apabila tidak diperhatikan penempatannya dalam tata ruang wilayah dapat menimbulkan masalah tersendiri terutama mengenai ketersediaan infrastruktur.

Perkembangan infrastruktur di Indonesia secara umum sudah membaik namun masih dibawah rata-rata. Perbaikan tercepat pada kepemilikan handphone dan infrastruktur bandara. *The Global Competitiveness Report 2013-2014* telah melakukan survey terhadap ketersediaan infrastruktur di semua negara dengan menggunakan *infrastructure index* dengan skor maksimal 7 (Team BI, 2014). Ketersediaan infrastruktur di Indonesia secara umum tahun 2011 mempunyai skore 3,9 kemudian turun menjadi 3,7 tahun 2012 dan naik kembali ke angka 4,0 tahun 2013. Namun ketersediaan infrastruktur di Indonesia tahun 2013 ini menduduki rangking ke-82 dari 148 negara yang disurvei. Ketersediaan

infrastruktur di Indonesia dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara sedikit lebih baik dibandingkan Philipina (rangking 98) namun jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura (rangking 5), Malaysia (rangking 25) dan Thailand (rangking 61). Komponen pilar infrastruktur yang dinilai meliputi delapan item, infrastruktur di Indonesia terbaik dalam ketersediaan airlineseat (rangking 15), kemudian kualitas jalan kereta api (rangking 44), telepon seluler (rangking 62), kualitas pelabuhan udara (rangking 62), kualitas jalan (rangking 78), sambungan telepon (rangking 82), ketersediaan listrik (rangking 89) dan kualitas pelabuhan (rangking 89).

Perkembangan infrastruktur di Kalimantan Timur sudah cukup menggembirakan. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kesepakatan lima gubernur provinsi-provinsi di Kalimantan pada Forum Kerja Sama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK), terutama jalan dan jembatan, mulai dari dalam provinsi-provinsi masing-masing maupun yang menghubungkan kelima provinsi. Ketersediaan infrastruktur yang baik dipercaya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemudian menyejahterakan rakyat agar kehidupannya lebih baik lagi. Saat ini hampir seluruh jalan yang menghubungkan kelima provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara, sudah dibangun walau dengan kualitas dan kondisi yang tidak sama.

*Indonesia International Infrastructure and Exhibition 2012 (IIICE2012)*, memberikan pandangan yang kritikal untuk industri infrastruktur seperti Energi

Pembangkit Daya dan Distribusi, Teknologi informasi dan komunikasi, Transportasi jalan, udara, laut dan air serta dan manajemen air dan limbah. Penilai kelayakan infrastruktur merupakan suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya. Di Indonesia studi ini belum pernah dilakukan dalam pemerintahan SBY meskipun sudah membentuk MP3 EI untuk pengembangan daerah tertinggal namun prakiraan kebutuhan infrastruktur dan biayanya belum diketahui secara pasti sehingga dapat menimbulkan banyak masalah.

Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang dan ada beberapa kabupaten menjadi provinsi baru, penilaian infrastruktur sangatlah penting. Infrastruktur yang masih ada masih terbatas, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan potensi infrastrukturnya dalam menghadapi perkembangan dimasa datang. Total panjang jalan negara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur adalah 2.118,18 yang mana sekitar 83% sudah beraspal, sedangkan sisanya belum. Jalan negara dalam kondisi baik adalah sekitar 42,03%. Total panjang jalan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur adalah 10,533,84km yang terdiri dari permukaan aspal sepanjang 2570,99 km atau 24,41% sedangkan sisanya belum. Berdasarkan kondisinya, jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik sepanjang 4.129,21 km atau 31,20 % sedangkan sisanya dalam keadaan sedang, rusak, dan rusak berat. Di Kalimantan Timur, terdapat 12 Pelabuhan Udara seperti Sepinggian Balikpapan, Temindung Samarinda, bandara bontang, Datah Dawai Mahakam Ulu, Kota

Bangun Kutai Kartanegara, Long Apari Kutai Barat, Maratua Kepulauan Derawan, Melalan Merak Barong Tongkok, Muara Wahau Kutai Timur, Paser Tanah Grogot, Tanjung Bara Sangata, dan Kalimantan Berau. Bandar Udara Internasional Balikpapan, pada tahun 2013 telah memberangkatkan dan menurunkan penumpang paling banyak. Pada tahun 2013 telah memberangkatkan sebanyak 3,33 juta lebih penumpang dan telah menurunkan sekitar 3,35 juta penumpang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana mengetahui kelayakan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan sosial di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.3 Tujuan**

Menilai sampai sejauh mana kelayakan infrastruktur menurut para insinyur teknik sipil dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur serta memberikan informasi biaya yang dibutuhkan.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi: jalan nasional, provinsi dan kabupaten, jembatan, bandara, terminal, pelabuhan sarana penunjang seperti air minum, telekomunikasi serta listrik di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.5 Keaslian Tugas Akhir**

Berdasarkan data tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tugas akhir dengan judul Analisis Kelayakan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Penilaian Praktisi dan Akademisi Teknik Sipil belum pernah dilakukan sebelumnya.

### **1.6 Manfaat**

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya.
2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.